
IMAN KRISTIANI DI TENGAH KEHIDUPAN POLITIK DAN PERDAMAIAN DUNIA: REFLEKSI TEOLOGIS ATAS GAUDIUM ET SPES 73-78

Yanto Sandy Tjang^{1*}, Florensus Sutami², Gregorius Kukuh Nugroho³,
Alexander Maruli Tua Sinaga⁴, Janti Sudono⁵, Kristina Meni⁶, Roida
Sihombing⁷, Theresia Lina Iswaraningsih⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*Email: ystjang17766@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara teologis relasi antara iman Kristiani, kehidupan politik, dan panggilan membangun perdamaian dunia dengan bertumpu pada *Gaudium et Spes* artikel 73–78. Di tengah konteks global kontemporer yang ditandai oleh konflik bersenjata, krisis demokrasi, polarisasi ideologis, dan ketidakadilan struktural, penelitian ini menegaskan relevansi berkelanjutan teologi sosial Konsili Vatikan II bagi kehadiran iman Kristiani di ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan tekstual-kontekstual terhadap dokumen Konsili, serta dialog kritis dengan literatur teologi sosial dan etika politik Kristiani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik, dalam perspektif iman, dipahami sebagai bentuk pelayanan terhadap kesejahteraan umum (*bonum commune*) dan sebagai medan konkret penghayatan tanggung jawab etis umat beriman. Relasi antara Gereja dan negara dibangun atas prinsip otonomi yang sehat dan dialogis, yang memungkinkan Gereja menjalankan peran moral dan profetisnya tanpa jatuh ke dalam dominasi kekuasaan. Lebih jauh, *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa perdamaian sejati bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan buah keadilan yang berakar pada karya perdamaian Allah dalam Kristus. Dengan demikian, iman Kristiani dipahami sebagai kekuatan transformatif yang memiliki dimensi publik esensial dan mendorong keterlibatan etis umat dalam upaya membangun keadilan dan perdamaian dunia.

Kata kunci: *Gaudium et Spes*; Iman Kristiani; Perdamaian dunia; Politik; Teologi sosial Gereja.

Abstract

The study offers a theological examination of the relationship between Christian faith, political life, and the vocation to build world peace, grounded in Gaudium et Spes articles 73–78. Within the contemporary global context marked by armed conflicts, democratic crises, ideological polarization, and structural injustice, the study reaffirms the enduring relevance of the Second Vatican Council's social theology for the presence of Christian faith in the public sphere. Employing a qualitative research design, the study is based on a literature review with a textual–contextual analysis of conciliar documents, combined

with critical engagement with works in social theology and Christian political ethics. The findings indicate that, from the perspective of faith, politics is understood as a form of service to the common good (bonum commune) and as a concrete arena for the enactment of the ethical responsibility of believers. The relationship between Church and state is articulated through the principle of a healthy and dialogical autonomy, which enables the Church to exercise its moral and prophetic role without succumbing to the logic of power or domination. Furthermore, Gaudium et Spes affirms that authentic peace is not merely the absence of conflict but the fruit of justice rooted in God's reconciling work in Christ. Accordingly, Christian faith is presented as a transformative force with an essential public dimension, one that fosters the ethical engagement of believers in the pursuit of justice and peace in the world.

Keywords: *Christian faith; Gaudium et Spes; Politics; Social theology of the Church; World peace.*

PENDAHULUAN

Relasi antara iman Kristiani dan kehidupan politik merupakan salah satu tema sentral dalam refleksi teologi sosial Gereja, terutama ketika ditempatkan dalam konteks dunia kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas dan ketidakpastian geopolitik (Šola & Bižaca, 2025). Fenomena seperti konflik bersenjata yang berkepanjangan, polarisasi ideologis yang kian meningkat, degradasi kualitas demokrasi, serta menguatnya ketidakadilan struktural memperlihatkan bahwa dinamika politik senantiasa bersinggungan dengan persoalan martabat manusia dan upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan (Sugiarto, 2021). Dalam konteks tersebut, refleksi teologis mengenai keterlibatan iman dalam ruang politik tidak lagi dapat dipandang sebagai diskursus normatif semata, melainkan sebagai kebutuhan yang mendesak agar menjadi kontribusi profetis bagi kehidupan publik (Apner, 2021).

Momentum penting dalam pembaruan sikap Gereja terhadap dunia modern tampak secara jelas dalam *Gaudium et Spes* yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II. Melalui dokumen ini, Gereja tidak lagi mengambil posisi defensif terhadap realitas sosial-politik, melainkan memahaminya sebagai ruang dialog dan partisipasi aktif dalam sejarah manusia. Secara khusus, artikel 73–78 merumuskan landasan teologis mengenai hak dan kewajiban politik warga negara, relasi yang proporsional antara Gereja dan negara, serta tanggung jawab moral komunitas internasional dalam membangun tata dunia yang berakar pada keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Bagian ini

dengan demikian menjadi pijakan normatif sekaligus inspiratif bagi ajaran sosial Gereja terkait kehidupan politik dan perdamaian (Vatican Council II, 1965).

Namun, dalam praktik kehidupan beriman dewasa ini, politik kerap diasosiasikan dengan pragmatisme, kalkulasi kepentingan, dan kontestasi kekuasaan, sehingga dipersepsikan sebagai wilayah yang kurang sejalan dengan nilai-nilai Injil. Persepsi semacam ini mendorong sebagian umat untuk mengambil jarak atau bahkan bersikap apatis terhadap proses politik. Secara tidak langsung, sikap tersebut memperkuat dikotomi antara iman dan ruang publik, seakan-akan iman hanya relevan dalam lingkup privat dan spiritual (Zai & Gulo, 2025). Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*, kehidupan politik merupakan dimensi inheren dari panggilan manusia sebagai makhluk sosial dan moral, sekaligus medan konkret bagi perwujudan tanggung jawab iman (Vatican Council II, 1965).

Sejumlah studi dalam ranah teologi sosial telah mengulas keterlibatan Gereja dalam politik melalui beragam pendekatan, mulai dari etika politik Kristiani, advokasi hak asasi manusia, hingga refleksi kritis atas demokrasi. Sebagian penelitian menyoroti fungsi kenabian Gereja dalam mengkritik struktur yang tidak adil, sementara yang lain menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dan non-partisan dalam konteks masyarakat plural (Bakar & Wahyu, 2022; Malino et al., 2025; Masut et al., 2022). Meski demikian, pembahasan mengenai *Gaudium et Spes* kerap masih bersifat umum tanpa menempatkan artikel 73–78 sebagai satu kesatuan refleksi yang utuh mengenai politik dan perdamaian dunia. Selain itu, relasi antara ajaran konsili tersebut dan dinamika krisis geopolitik kontemporer belum banyak dieksplorasi secara eksplisit (Mali, 2013).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca kembali artikel 73–78 *Gaudium et Spes* secara integratif dan kritis dengan menempatkannya dalam dialog langsung dengan tantangan politik global dewasa ini. Kajian ini tidak hanya menguraikan dimensi normatif dokumen konsili, tetapi juga menafsirkan relevansi praksisnya bagi iman Kristiani sebagai daya transformatif dalam ruang publik. Dalam perspektif ini, iman tidak dipahami semata-mata sebagai sumber nilai personal, melainkan sebagai energi moral dan sosial yang mampu

membentuk budaya politik yang adil dan berorientasi pada perdamaian, sejalan dengan visi sosial yang juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus (Francis, 2020). Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya pengembangan teologi sosial Gereja, khususnya dalam menjembatani refleksi teologis dan realitas politik konkret. Dengan menegaskan bahwa perdamaian merupakan buah keadilan dan hasil dari keterlibatan aktif dalam struktur sosial-politik, studi ini memperdalam pemahaman mengenai peran umat Kristiani sebagai warga negara yang bertanggung jawab sekaligus saksi iman di tengah masyarakat. Refleksi ini juga relevan bagi masyarakat plural, di mana iman Kristiani dipanggil untuk berdialog dan bekerja sama dengan berbagai elemen sosial demi kesejahteraan bersama, sebagaimana ditekankan dalam ajaran sosial Gereja yang dirumuskan oleh Pontifical Council for Justice and Peace (2004).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merefleksikan secara teologis ajaran *Gaudium et Spes* artikel 73–78 tentang kehidupan politik dan perdamaian dunia, serta menganalisis relevansinya bagi keterlibatan iman Kristiani dalam konteks global kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa iman Kristiani memiliki dimensi publik yang esensial dan bahwa partisipasi politik yang berakar pada nilai-nilai Injil merupakan bagian integral dari panggilan Gereja untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di tengah dinamika sejarah manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis teologis atas artikel 73–78 *Gaudium et Spes* yang dipromulgasikan oleh Konsili Vatikan II. Pendekatan yang digunakan ialah teologi sosial dengan kerangka hermeneutika teologis, yakni membaca teks dalam dua horizon secara simultan: konteks historis-eklesial saat dokumen tersebut dirumuskan dan konteks geopolitik kontemporer yang ditandai oleh krisis demokrasi, konflik bersenjata, serta ketidakadilan struktural. Sumber primer berupa teks resmi *Gaudium et Spes* artikel 73–78, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur ajaran sosial Gereja dan kajian akademik yang relevan. Pemilihan sumber-sumber tersebut dimaksudkan untuk menempatkan

refleksi konsili dalam kesinambungan perkembangan ajaran sosial Gereja sekaligus memperluas kerangka konseptual mengenai politik dan perdamaian.

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan tekstual-kritis guna menelusuri struktur argumentasi dan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik yang mengelompokkan ajaran ke dalam tema kesejahteraan umum (*bonum commune*), otonomi Gereja dan negara, kebebasan moral, serta perdamaian sebagai buah keadilan. Tahap berikutnya berupa interpretasi kontekstual dengan mendialogkan temuan normatif tersebut dengan dinamika politik global dewasa ini, sehingga refleksi yang dihasilkan tidak berhenti pada deskripsi doktrinal, melainkan bergerak menuju implikasi etis dan pastoral yang konkret. Dengan pembatasan kajian pada artikel 73–78, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulas keseluruhan dokumen konsili, melainkan menghadirkan pembacaan yang integratif dan relevan, yang menegaskan dimensi publik iman Kristiani sebagai daya transformatif dalam kehidupan sosial-politik dan dalam upaya membangun perdamaian dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iman Kristiani dan Tanggung Jawab Politik

Dalam artikel 73, *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa orientasi mendasar kehidupan politik adalah kesejahteraan umum, yaitu terwujudnya kondisi sosial, ekonomi, dan kultural yang memungkinkan setiap pribadi dan kelompok berkembang secara integral sesuai martabatnya. Penegasan ini, yang dirumuskan dalam konteks pembaruan Gereja oleh Konsili Vatikan II, secara eksplisit menolak reduksi politik menjadi sekadar ajang perebutan kekuasaan atau instrumen pemenuhan kepentingan partikular. Politik dipahami sebagai ruang pelayanan publik yang terarah pada perlindungan martabat manusia, realisasi keadilan sosial, dan pembentukan keteraturan hidup bersama yang berkelanjutan (Gaut & Agustin, 2025). Dalam horizon iman Kristiani, kesejahteraan umum berakar pada antropologi teologis yang memandang manusia sebagai *imago Dei*. Karena martabat manusia melekat secara inheren dan tidak ditentukan oleh status sosial, afiliasi politik, ataupun kontribusi ekonomi, maka tanggung jawab politik umat Kristiani mencakup komitmen

untuk menilai dan mengkritisi kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap martabat tersebut, terutama bagi mereka yang miskin, tersingkir, dan rentan. Dengan demikian, politik dipahami sebagai sarana konkret untuk menghadirkan keadilan struktural, yakni perwujudan kasih yang diorganisasikan dalam tatanan sosial dan kelembagaan (Bosschaert, 2017).

Oleh sebab itu, keterlibatan politik umat Kristiani bukanlah pilihan tambahan yang bersifat pragmatis, melainkan konsekuensi etis yang inheren dalam iman. Kasih kepada sesama tidak berhenti pada praksis karitatif individual, tetapi menuntut transformasi struktur sosial yang melanggengkan ketidakadilan (Francis, 2020). *Gaudium et Spes* mengundang umat beriman untuk melihat politik sebagai medan di mana iman diuji sekaligus diaktualisasikan secara publik melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, advokasi kebijakan yang adil, serta pembelaan hak asasi manusia (Vatican Council II, 1965). Pada saat yang sama, konsili menunjukkan kesadaran realistis terhadap ambiguitas dunia politik yang kerap diwarnai korupsi, manipulasi, dan berbagai bentuk kekerasan, baik simbolik maupun struktural. Oleh karena itu, politik tidak diidealkan melainkan ditempatkan di bawah terang kritik moral yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, iman Kristiani berfungsi sebagai daya korektif yang menantang logika kekuasaan ketika ia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Umat Kristiani dipanggil untuk mengembangkan etika politik yang berakar pada kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kebenaran dan keadilan (Gaut & Agustin, 2025).

Lebih lanjut, artikel 76 *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa Gereja tidak mengidentikkan dirinya dengan sistem politik tertentu maupun terikat pada bentuk pemerintahan tertentu. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga kebebasan Gereja dalam melaksanakan perutusannya serta mencegah reduksi iman menjadi sarana legitimasi kekuasaan. Namun, otonomi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai netralitas pasif atau sikap acuh terhadap realitas politik. Justru melalui kebebasan inilah Gereja memiliki ruang untuk menjalankan fungsi profetisnya secara kritis terhadap praktik politik yang bertentangan dengan martabat manusia dan kesejahteraan umum (Vatican Council II, 1965). Hak dan kewajiban moral Gereja dalam menilai kehidupan politik berakar pada

identitasnya sebagai sakramen keselamatan dan tanda harapan bagi dunia. Ketika kebijakan publik mengabaikan keadilan, melanggengkan kekerasan, atau menindas kelompok tertentu, Gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan yang dominan. Dimensi profetis ini menempatkan iman Kristiani sebagai suara nurani publik yang mengingatkan bahwa kekuasaan politik bersifat relatif dan senantiasa tunduk pada hukum moral yang melindungi martabat manusia (Francis, 2020).

Dalam konteks pluralisme dan demokrasi modern, tanggung jawab politik umat Kristiani menuntut kemampuan berdialog dan bekerja sama dengan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang ideologis dan religius yang beragam. Iman Kristiani tidak dihadirkan sebagai instrumen dominasi atau pemaksaan moral, melainkan sebagai sumber inspirasi etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional di ruang publik. Melalui pendekatan dialogis ini, nilai-nilai Injil: keadilan, solidaritas, dan perdamaian, dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pembentukan kehidupan politik yang inklusif dan berkeadaban (Gaut & Agustin, 2025). Dengan demikian, iman Kristiani dan tanggung jawab politik berada dalam relasi yang saling menguatkan: iman menyediakan orientasi moral dan horizon makna bagi keterlibatan politik, sementara politik menjadi ruang konkret penghayatan iman dalam dinamika sejarah. Refleksi *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa penarikan diri dari politik tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk kesalehan autentik, melainkan berisiko mengabaikan panggilan Kristiani untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam struktur kehidupan bersama. Dalam terang ini, tanggung jawab politik merupakan dimensi integral dari kesaksian iman Kristiani di tengah dunia (Masut et al., 2022).

Gereja, Negara, dan Kebebasan Moral

Artikel 76 dalam *Gaudium et Spes* menegaskan pentingnya prinsip otonomi yang sehat antara Gereja dan negara sebagai fondasi relasi yang proporsional antara iman dan kehidupan publik. Prinsip ini secara tegas menolak dua kecenderungan ekstrem: subordinasi Gereja di bawah kontrol negara maupun dominasi institusi Gereja atas tatanan politik. Dalam refleksi Konsili Vatikan II,

ditegaskan bahwa Gereja dan negara memiliki bidang kewenangan yang berbeda sesuai dengan hakikat dan perutusannya masing-masing. Kendati demikian, keduanya tidak berjalan dalam isolasi, sebab sama-sama diarahkan pada pelayanan terhadap manusia dan perwujudan kesejahteraan umum. Dengan demikian, relasi Gereja dan negara dipahami secara dialogis dan komplementer, bukan sebagai arena rivalitas kekuasaan, melainkan sebagai kerja sama yang saling menghormati demi kebaikan bersama (Ciftci, 2024).

Dalam kerangka ini, negara memiliki legitimasi moral untuk mengatur kehidupan sosial dan politik demi ketertiban umum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Kewenangan tersebut tidak bersumber dari klaim kekuasaan absolut, melainkan dari tanggung jawab etis untuk melayani kesejahteraan bersama. Konsekuensinya, negara tidak dapat dilepaskan dari penilaian moral, karena setiap kebijakan publik selalu membawa implikasi langsung bagi martabat manusia. Perspektif ini menolak pemahaman positivistik tentang hukum yang memisahkan secara kaku antara legalitas dan moralitas, serta menegaskan bahwa hukum yang adil harus berakar pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Malino et al., 2025). Di sisi lain, Gereja menjalankan perutusannya terutama dalam ranah moral dan spiritual, yakni membimbing dan membentuk hati nurani umat agar mampu menilai realitas sosial-politik secara kritis dan bertanggung jawab. Peran ini bukan bersifat teknokratis atau administratif, melainkan profetis dan pedagogis. Gereja tidak menawarkan solusi politik praktis atau program kekuasaan, tetapi menyampaikan prinsip-prinsip etis yang bersumber dari Injil dan ajaran sosial Gereja. Dengan cara ini, Gereja menolong umat beriman untuk bertindak sebagai subjek moral yang bebas dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik (Massaro, 2021).

Kebebasan moral menjadi titik temu yang penting dalam relasi antara Gereja dan negara. *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa kebebasan sejati tidak dapat direduksi menjadi kebebasan tanpa batas, melainkan kemampuan untuk memilih yang baik dan benar sesuai dengan martabat manusia (Vatican Council II, 1965). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani sebagai hak dasar manusia.

Sementara itu, Gereja berperan membentuk hati nurani agar kebebasan tersebut tidak terjerumus ke dalam relativisme moral atau dimanipulasi oleh kepentingan ideologis dan politis (Perry, 2014).

Prinsip otonomi yang sehat ini menjadi semakin relevan dalam konteks pluralisme modern, di mana masyarakat terdiri dari beragam keyakinan religius, pandangan ideologis, dan orientasi moral. Gereja tidak memaksakan iman Kristiani sebagai norma hukum negara, karena pemaksaan semacam itu bertentangan dengan martabat manusia dan kebebasan beriman. Sebaliknya, Gereja hadir di ruang publik melalui kesaksian hidup, dialog yang terbuka, serta argumentasi etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, tanpa kehilangan identitas iman Kristianinya (Ciftci, 2024). Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai Injil ditawarkan sebagai kontribusi moral bagi kehidupan bersama, bukan sebagai instrumen dominasi religius. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap martabat manusia, solidaritas dengan kaum miskin dan tersingkir, keadilan sosial, serta perdamaian universal memiliki relevansi yang melampaui batas-batas internal Gereja. Dengan demikian, iman Kristiani berfungsi sebagai sumber inspirasi etis yang memperkaya diskursus publik dan mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih manusiawi dan berkeadaban (Kim, 2024).

Namun demikian, relasi antara Gereja dan negara tidak lepas dari potensi ketegangan, terutama ketika negara mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar. Dalam situasi semacam ini, Gereja dipanggil untuk menjalankan fungsi kritis dan profetisnya, meskipun sikap tersebut berisiko menimbulkan resistensi atau marginalisasi. Kritik moral Gereja bukan merupakan bentuk oposisi politis, melainkan ekspresi kesetiaan pada kebenaran dan pembelaan terhadap martabat manusia. Kebebasan moral Gereja menjadi syarat utama agar suara profetis tersebut dapat disampaikan secara otentik dan bertanggung jawab (Francis, 2020). Relasi antara Gereja, negara, dan kebebasan moral sebagaimana dirumuskan dalam *Gaudium et Spes* artikel 76 menawarkan visi teologis yang seimbang dan relevan bagi dunia modern. Gereja dan negara dipanggil untuk saling menghormati otonomi masing-masing, sambil bekerja sama demi kesejahteraan manusia dan perdamaian bersama. Dalam horizon ini,

iman Kristiani tidak tersingkir dari ruang publik, melainkan hadir sebagai kekuatan moral yang membebaskan, mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, dan memanusiakan kehidupan politik (Vatican Council II, 1965).

Perdamaian sebagai Buah Keadilan

Artikel 77–78 *Gaudium et Spes* menghadirkan refleksi teologis yang mendalam dan visioner mengenai perdamaian dunia dengan menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dipahami secara sempit sebagai ketiadaan perang atau absennya konflik bersenjata. Konsili Vatikan II memandang perdamaian sebagai realitas dinamis yang harus dibangun dan dipelihara secara terus-menerus melalui tatanan sosial yang adil. Dalam perspektif ini, perdamaian merupakan hasil dari relasi sosial yang berkeadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap pribadi dan bangsa (Francis, 2020; Vatican Council II, 1965). Pemahaman tersebut secara tegas menolak pendekatan realisme politik yang memandang konflik dan kekerasan sebagai keniscayaan dalam relasi antarnegara. *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa akar terdalam dari perang dan kekerasan terletak pada ketidakadilan struktural, penindasan ekonomi, serta pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perdamaian yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa perubahan mendasar terhadap struktur sosial dan politik yang melanggengkan ketimpangan. Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar nilai tambahan, melainkan prasyarat fundamental bagi perdamaian yang autentik dan berkelanjutan (Vatican Council II, 1965; Powers, 2021).

Dalam terang iman Kristiani, perdamaian memiliki dimensi teologis yang melampaui konstruksi sosial dan politik semata. Perdamaian berakar pada Allah sendiri sebagai sumber kehidupan dan kebaikan, yang dalam Yesus Kristus mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Misteri rekonsiliasi ini menyingkapkan bahwa perdamaian bukan hanya hasil dari kesepakatan atau negosiasi manusia, melainkan anugerah ilahi yang menuntut tanggapan aktif dan konkret dari manusia. Dengan demikian, upaya membangun perdamaian dipahami sebagai partisipasi dalam karya penyelamatan Allah yang berlangsung di dalam sejarah (Montevecchio, 2023). Konsekuensi dari pemahaman teologis ini adalah bahwa

perdamaian tidak dapat dilepaskan dari salib Kristus, yang menyingkapkan penolakan radikal terhadap kekerasan sebagai jalan keselamatan. *Gaudium et Spes* secara eksplisit mengecam perlombaan senjata dan ancaman pemusnahan massal sebagai tindakan yang bertentangan dengan akal budi dan hukum moral. Logika deterensi dan supremasi militer dikritik karena justru memperdalam rasa takut, ketidakpercayaan, dan ketegangan antarbangsa, alih-alih menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian sejati (Francis, 2020; Vatican Council II, 1965).

Sebagai alternatif, Konsili Vatikan II menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama internasional sebagai jalan menuju perdamaian. Dialog dipahami bukan sebagai kompromi yang mengorbankan kebenaran, melainkan sebagai kesediaan untuk mengakui martabat dan kemanusiaan pihak lain serta mencari solusi yang adil secara bersama-sama. Dalam horizon ini, perdamaian menuntut keberanian moral untuk mengampuni, membangun kembali relasi yang terluka, dan menolak budaya balas dendam yang sering kali menjadi sumber konflik berkepanjangan (Vatican Council II, 1965). Peran Gereja dalam membangun perdamaian memiliki karakter yang khas dan tidak dapat direduksi menjadi fungsi politik semata. Gereja tidak memiliki kekuatan koersif, tetapi menghadirkan otoritas moral dan spiritual yang membentuk hati nurani umat dan masyarakat. Melalui pendidikan perdamaian, pewartaan iman, serta kesaksian hidup komunitas Kristiani, Gereja berkontribusi pada pembentukan budaya damai yang berakar pada keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia (Massaro, 2021).

Dalam konteks konflik global yang semakin kompleks, mulai dari perang bersenjata, terorisme, hingga kekerasan struktural akibat ketidakadilan ekonomi, *Gaudium et Spes* mengundang umat Kristiani untuk mengambil peran aktif sebagai pembawa damai (Vatican Council II, 1965). Panggilan ini tidak terbatas pada doa dan refleksi spiritual, tetapi juga mencakup keterlibatan konkret dalam inisiatif sosial, advokasi kebijakan publik yang berkeadilan, serta kerja sama lintas agama dan bangsa demi mencegah kekerasan dan memulihkan relasi yang rusak (Francis, 2020). Dengan demikian, iman Kristiani berfungsi sebagai kekuatan transformatif yang menantang apa yang dalam teologi sosial

disebut sebagai “struktur dosa,” yakni sistem dan praktik sosial yang mengabadikan ketidakadilan dan kekerasan. Perdamaian sebagai buah keadilan bukanlah sebuah utopia abstrak, melainkan horizon eskatologis yang mulai diwujudkan dalam sejarah melalui komitmen etis dan praksis nyata umat beriman (Kelly, 2019). Refleksi *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa membangun perdamaian berarti mengambil bagian dalam karya Allah yang memulihkan dunia dan memanggil manusia untuk hidup sebagai saudara dan saudari dalam keadilan serta kasih (Vatican Council II, 1965).

Implikasi Teologis Pastoral

Refleksi teologis atas *Gaudium et Spes* artikel 73–78 memiliki konsekuensi pastoral yang signifikan bagi kehidupan dan perutusan Gereja di tengah dunia kontemporer. Ajaran Konsili Vatikan II tersebut menantang Gereja untuk menerjemahkan prinsip-prinsip teologis mengenai kehidupan politik, kebebasan moral, dan perdamaian ke dalam praksis pastoral yang konkret dan kontekstual. Dengan demikian, pelayanan pastoral tidak dapat direduksi pada pembinaan spiritual internal semata, melainkan harus menyentuh dimensi sosial dan politik kehidupan umat sebagai bagian integral dari pewartaan Injil dan misi keselamatan Gereja (Francis, 2020; Vatican Council II, 1965). Implikasi teologis pastoral yang diharapkan adalah seperti uraian berikut.

Pertama, dalam ranah pembinaan iman, Gereja dipanggil untuk mengembangkan pendidikan iman yang secara eksplisit membentuk kesadaran sosial dan politik umat. Katekese, homili, serta pendidikan teologi bagi kaum awam perlu diarahkan untuk membantu umat memahami bahwa keterlibatan dalam kehidupan publik merupakan konsekuensi logis dari iman Kristiani. Melalui pembinaan semacam ini, iman tidak dipersepsikan sebagai pelarian dari realitas sosial, melainkan sebagai sumber daya spiritual yang menumbuhkan keberanian moral, kepekaan terhadap ketidakadilan, dan komitmen terhadap kesejahteraan umum (Massaro, 2021).

Kedua, implikasi pastoral *Gaudium et Spes* tampak jelas dalam pembentukan hati nurani umat beriman. Gereja memiliki peran strategis dalam mendampingi umat agar mampu menilai realitas politik secara kritis dan etis,

tanpa terjebak dalam fanatisme ideologis maupun sikap apatis terhadap kehidupan publik. Pendampingan pastoral perlu menegaskan pentingnya kebebasan moral yang bertanggung jawab, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan politik berdasarkan nilai-nilai Injil seperti kejujuran, solidaritas, penghormatan terhadap kehidupan, serta keberpihakan kepada kaum miskin dan tersingkir (Francis, 2020).

Ketiga, dalam konteks pluralisme dan masyarakat multikultural, praksis pastoral Gereja dituntut untuk bersifat dialogis dan inklusif. Gereja dipanggil untuk membangun kerja sama dengan pemeluk agama lain, organisasi masyarakat sipil, dan institusi negara dalam upaya memajukan keadilan sosial dan perdamaian. Kerja sama lintas iman dan lintas sektor ini merupakan perwujudan konkret dari semangat *Gaudium et Spes*, yang menempatkan Gereja sebagai mitra dialog dan pembangun peradaban kasih, tanpa mengorbankan identitas dan integritas iman Kristiani (Latinovic et al., 2019).

Keempat, dimensi pastoral perdamaian menuntut perhatian khusus terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan, konflik bersenjata, dan ketidakadilan struktural. Gereja dipanggil untuk menghadirkan solidaritas yang nyata melalui pelayanan rekonsiliasi, pendampingan pastoral, serta advokasi bagi kelompok-kelompok yang hak-haknya dilanggar. Dengan sikap ini, Gereja tidak hanya mewartakan perdamaian sebagai nilai teologis, tetapi juga menghidupinya sebagai praksis konkret pembelaan terhadap martabat manusia dan pemulihan relasi sosial yang rusak (Schreiter, 2010).

Pada akhirnya, implikasi teologis-pastoral dari *Gaudium et Spes* artikel 73–78 menegaskan bahwa misi Gereja tidak dapat dipisahkan dari pergulatan konkret umat manusia dalam sejarah. Pastoral yang berakar pada iman Kristiani dipanggil untuk membentuk umat sebagai warga Kerajaan Allah sekaligus warga dunia yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan iman, etika, dan praksis sosial-politik, Gereja dapat memberikan kesaksian yang kredibel dan relevan tentang Injil sebagai kabar baik yang membebaskan dan meneguhkan harapan akan keadilan, perdamaian, dan masa depan umat manusia (Vatican Council II, 1965).

KESIMPULAN

Refleksi atas *Gaudium et Spes* artikel 73–78 menegaskan bahwa iman Kristiani memiliki dimensi publik yang esensial dan menuntut keterlibatan aktif umat dalam kehidupan politik sebagai pelayanan terhadap kesejahteraan umum. Politik dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan martabat manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama, sementara prinsip otonomi yang sehat antara Gereja dan negara menegaskan relasi yang dialogis dan komplementer. Dalam konteks pluralisme modern, Gereja tidak bertindak sebagai kekuatan dominatif, melainkan sebagai suara moral yang memperkaya ruang publik melalui nilai-nilai Injili yang rasional dan inklusif. Lebih lanjut, *Gaudium et Spes* artikel 77–78 menegaskan bahwa perdamaian sejati merupakan buah keadilan yang berakar pada karya pendamaian Allah dalam Kristus dan harus diwujudkan melalui penolakan terhadap kekerasan, dialog yang tulus, serta solidaritas lintas batas. Dengan demikian, iman Kristiani tampil sebagai kekuatan transformatif yang menantang struktur ketidakadilan dan menghadirkan harapan akan budaya damai yang bermartabat di tengah dunia yang terus dilanda konflik dan krisis kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apner, G. J. (2021). Kehadiran Kristiani dalam Politik : Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan dalam Ruang Publik Politis di Indonesia. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 6(2), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.46933/DGS.vol6i21-24>
- Bakar, A., & Wahyu, M. (2022). Gereja dan Partisipasi Politik. *Vox Populi*, 5(1), 61–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>
- Bosschaert, D. (2017). Understanding the shift in *Gaudium et spes*: From theology of history to Christian anthropology. *Theological Studies*, 78(3), 634–658. <https://doi.org/10.1177/0040563917714620>
- Ciftci, M. Y. (2024). *Vatican II on church–state relations: What did the council teach, and what’s wrong with it?* Palgrave Macmillan.
- Francis, P. (2020). *Fratelli tutti: Encyclical letter on fraternity and social friendship*. Libreria Editrice Vaticana.

- Gaut, W., & Agustin, D. (2025). Revisiting the reception of Gaudium et Spes's vision of the Church–world relationship. *Asian Horizons*, 19(1), 86–103.
- Vatican Council II. (1965). *Gaudium et spes: Pastoral constitution on the Church in the modern world*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kelly, C. M. (2019). The Nature and Operation of Structural Sin: Additional Insights from Theology and Moral Psychology. *Theological Studies*, 80(2), 293–327. <https://doi.org/10.1177/0040563919836201>
- Kim, S. (2024). The public role of religion and the response of public theology. *Religions*, 15(4), 449. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15040449>
- Latinovic, V., Mannion, G., & Welle, J. (Eds.). (2019). *Catholicism opening to the world and other confessions: Vatican II and its impact (Pathways for ecumenical and interreligious dialogue)*. Palgrave Macmillan.
- Mali, M. (2013). Gereja dan keterlibatannya dalam dunia: Refleksi pastoral atas Gaudium et spes. *Jurnal Teologi*, 02(02), 139–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.24071/jt.v2i2.441>
- Malino, Y., Supratikno, A., & Ludji, I. (2025). Agama dan etika politik: Peran gereja dalam diskursus etika politik era Reformasi. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 9(2), 684–705. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472>
- Massaro, T. (2021). Social Welfare and Catholic Social Teaching : Foundational Theological Principles for Case Studies. *Religions*, 12(5), 288. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12050288>
- Masut, V. R., Barut, M. C. P. N., Muwa, F., & Budi, A. S. (2022). Tinjauan Gaudium et spes tentang martabat manusia dalam kasus terorisme. *Jurnal Masalah Pastoral*, X(2), 81–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i2.72>
- Montevecchio, C. A. (2023). Catholic Peacebuilding in Times of Crisis: Hope for a Wounded World. *Journal of Moral Theology*, 12(2), 78–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.55476/001C.84392>
- Peace, P. C. for J. and. (2004). *Compendium of the social doctrine of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Perry, M. J. (2014). Freedom of conscience as religious and moral freedom. *Journal*

- of Law and Religion*, 29(1), 124–141. <https://doi.org/10.1017/jlr.2013.1>
- Powers, G. F. (2021). The Catholic Peacebuilding Network : Lessons Learned. *The Journal of Social Encounters*, 5(2), 2–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.69755/2995-2212.1088>
- Schreiter, R. J. (2010). *Peacebuilding: Catholic theology, ethics, and praxis*. Orbis Books.
- Šola, I., & Bižaca, N. (2025). Catholic Involvement in Politics : Some Theological and Anthropological Considerations. *Religions*, 16(4), 485. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel16040485>
- Sugiarto, B. A. T. (2021). Spiritualitas politik dalam perspektif Kristiani. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 404–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13389>
- Zai, N., & Gulo, J. (2025). Panggilan Kristen dalam politik: Melayani dengan integritas dan kasih. *Imitatio Christo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 30–45. <https://doi.org/10.63536/imitatiochri>